

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021

RPJMD merupakan *legal standing* antara eksekutif dan legislatif sebagai kesepakatan politik dalam penyelenggaraan pembangunan pada Pemerintah Daerah. Dalam RPJMD tertuang visi dan misi Pemerintah Daerah yang akan menjadi tujuan akhir pada tahun tertentu dan ditopang oleh tahapan RKPD pertahun yang kemudian menjadi kerangka acuan dalam penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabarkan pada tahapan mekanisme Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah untuk lima tahun ke depan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, tanggal 15 Agustus 2016.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016, merupakan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam pelaksanaannya RPJMD telah dijabarkan kedalam RKPD tahun 2016 yang mengambil tema “*Memantapkan Sektor Perikanan dan Pariwisata Bagi Peningkatan Daya Saing Daerah*”. Terkait hal tersebut maka berdasarkan sistematika dan struktur penyusunan LKPJ pada bab ini akan digambarkan visi, misi, strategi dan prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021.

B. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi, serta program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan hasil proses politik yang secara langsung

oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program dimaksud dijadikan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian, kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahap ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, substansi RPJM Nasional 2015-2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2022, sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sebagai berikut : ***“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”***

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni: 1) Masyarakat maritim sejahtera; 2) Nilai keagamaan; dan 3) Nilai kultural. “Masyarakat Maritim yang Sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Nilai Keagamaan” dan “Nilai Kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam

pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

“Masyarakat Maritim yang Sejahtera”, mengandung dua pengertian kondisi, yakni masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai masyarakat maritim, dan masyarakat Kepulauan Selayar sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam pokok visi ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan sosial, keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam yang unggul, serta produktivitas dan daya saing daerah.

“Berbasis Nilai Keagamaan”, mengandung pengertian bahwa masyarakat Selayar dalam lima tahun ke depan akan semakin mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan rukun serta menempatkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan.

“Berbasis Nilai Kultural”, mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun kedepan kebudayaan daerah akan semakin berkembang dalam merespon dinamika kebudayaan nasional dan global. Dalam pokok visi ini tradisi dan kearifan lokal ditempatkan sebagai unsur yang akan terlestarikan secara dinamis.

Sedangkan misi secara umum adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan

strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian di atas, dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode lima tahun RPJMD 2016-2021, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan.

Misi ini mencakup; Upaya-upaya dalam menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat bagi kehidupan beragama; Membangun pusat kajian agama dan budaya; Mendorong pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah; Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan.

Misi ini mencakup upaya-upaya; Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; Menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik; Meningkatkan profesionalitas dan

kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta penerapan sistem *punishment and reward*; Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat; Melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu; dan Membangun kesadaran politik; serta Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Misi ini berfokus pada upaya-upaya; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kualitas manusia. Tercakup didalamnya upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi serta peningkatan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga; Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; dan Membina kegiatan kepemudaan, membudayakan, serta dan meningkatkan prestasi keolahragaan.

4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata.

Misi ini mencakup upaya-upaya; Pengembangan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas dari dan ke Selayar, serta meningkatkan prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan yang terintegrasi wilayah daratan dan kepulauan; Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, air, dan energi; khusus pengembangan jalan pada wilayah daratan pulau Selayar, diarahkan agar terkoneksi dan searah dengan pengembangan sektor-sektor strategis lainnya; Berkembangnya sentra-sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta Kawasan Industri Perikanan Terpadu, dan menjadikan Selayar sebagai pusat budidaya ikan karang; Memberikan akses dan kemudahan berinvestasi; serta Mendorong kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan dukungan kebijakan untuk terealisasinya kebijakan dan program daerah yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.

Misi ini berfokus pada; Peningkatan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tercakup didalamnya upaya membangun sentra pengembangan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan; Meningkatkan kesadaran dalam pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

6. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan.

Misi ini berfokus pada upaya-upaya; Peningkatan produktivitas dari bidang usaha ekonomi yang berkembang khususnya yang berbasis kerakyatan. Tercakup di dalamnya upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi berbasis teknologi pada masyarakat; Dukungan permodalan dan manajemen bagi usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan daya saing; serta Mencetak wirausahawan pada desa dan kelurahan.

7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan.

Misi ini berfokus pada; Strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah lokal dan penguatan lembaga adat; Pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

Berdasarkan uraian misi ini dapat dilihat keterkaitannya dengan pokok visi pada rumusan visi. Pada dasarnya setiap misi memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang akan diupayakan perwujudannya. Dengan formulasi demikian maka dapat dijamin bahwa setiap pokok visi memiliki keterkaitan dengan rumusan misi tertentu dalam mencapainya. Keterkaitan dengan misi dengan pokok visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dievaluasi (*learning process*).

Tabel 2.a
Identifikasi Strategi Berdasarkan Metode Analisis SWAT

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
Misi 1:					
Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan					
Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama (S-1)	Indeks pelaksanaan ibadah mahdah	Kekuatan: <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Secara keseluruhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penganut agama Kelemahan: <ul style="list-style-type: none"> Adanya gejala menurunnya semangat keagamaan pada sebagian penganut agama Internalisasi nilai keagamaan belum sepenuhnya tergambar dalam setiap aspek kehidupan masyarakat 	Peluang: <ul style="list-style-type: none"> Peran kelembagaan sosial keagamaan Ancaman: <ul style="list-style-type: none"> Isu ISIS Pemahaman agama yang menyimpang 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kerukunan kualitas kehidupan beragama Menjadikan masjid sebagai tempat mengajarkan kebaikan Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan sosial keagamaan Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan termasuk peserta didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan termasuk peserta didik di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan Meningkatkan kerukunan kualitas kehidupan beragama
	Indeks pelaksanaan ibadah muamalah				
	Indeks kualitas kerukunan umat beragama				

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
Misi 2:					
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif, dan transparan					
Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-2)	Opini Atas LKPD	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya kemampuan SDM Aparatur Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki sistem dan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada sistem anggaran yang bertanggung jawab, terbuka dan menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	<p>Skor Kapasitas dan Akuntabilitas kinerja birokrasi (<i>government effectiveness</i>)</p> <p>Skor evaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPD)</p>	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Dukungan kelembagaan pemerintah daerah Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah <p>Kelemahan :</p>	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor Meningkatkan ketersediaan fasilitas kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
	Indeks profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya hubungan koordinasi lintas sektor Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah yang masih rendah 	aturan pemerintah yang belum sempat tersosialisasikan ke pemerintah daerah		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S-4)	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Dukungan kelembagaan pemerintah daerah Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya budaya melayani di kalangan birokrasi pemerintah daerah Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah yang masih rendah 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan aturan pemerintah yang belum sempat tersosialisasikan ke pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas Meningkatkan kepedulian dan semangat pengabdian bagi Aparat Pemerintah daerah 	Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas
Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (S-4)	% Penurunan gangguan ketertiban dan keamanan	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Dukungan kelembagaan pemerintah daerah Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah terkait penciptaan kondisi yang kondusif <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan Tenaga Satuan Pol PP yang 	<ol style="list-style-type: none"> Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif Melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban 	Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
		Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah khususnya anggota Satpol PP 	belum memadai	dan ketentraman.	
Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah (S-6)	Transmigran lokal (KK)	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Ketersediaan lokasi penempatan transmigran lokal Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya akses masyarakat terhadap lahan dan lapangan pekerjaan 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah terkait penyelenggaraan urusan transmigrasi Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya alokasi anggaran dari pemerintah untuk membiayai pembebasan lahan 	1. Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi lokal	Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi lokal
Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa (S-5)	% Desa Mandiri %Desa Berkembang %Desa Tertinggal	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Komitmen Kepala Desa Dukungan masyarakat desa Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman hukum Aparat Pemerintah dan masyarakat Desa 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah Adanya sanksi yang tegas Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Aturan perundang-undangan yang multi tafsir 	1. Meningkatkan integritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik 2. Mendorong masyarakat desa agar	1. Meningkatkan integritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
				ikut berperan dalam mengawasi pemerintahan desa	
Misi 3:					
Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.					
Berkurangnya penduduk Miskin (S-6)	Angka Kemiskinan	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Tersedianya secara cukup sumber-sumber ekonomi daerah Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah terkait penuntasan kemiskinan Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Banyaknya pendatang dari daerah lain yang lebih mampu mengakses sumber-sumber ekonomi yang tersedia 	1. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi 2. Memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi
Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	Income per kapita penduduk	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Tersedianya secara cukup sumber-sumber ekonomi daerah Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya daya beli masyarakat 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya harga barang kebutuhan masyarakat 	1. Meningkatkan daya beli masyarakat	Meningkatkan daya beli masyarakat
Meningkatnya derajat pendidikan	Angka Melek Huruf	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah 	1. Memberikan pendidikan yang	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
masyarakat (S-10)	Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> kesadaran masyarakat dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Masih adanya peserta didik putus sekolah Masih adanya peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikannya 	terkait penyelenggaraan pendidikan Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Kompetensi lulusan yang tidak dapat bersaing memperebutkan kursi di Jenjang pendidikan lebih tinggi 	mempunyai pada masyarakat 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter	layanan pendidikan 2. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S-7)	Angka Usia Harapan Hidup	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Tersedia tenaga kesehatan Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Fasilitas kesehatan belum memadai Tenaga kesehatan tertentu terbatas/belum ada (khususnya dokter ahli/spesialis) 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Angka kesakitan relatif tinggi Angka kematian akibat penyakit relatif tinggi 	1. Memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
	Indeks Pembangunan Manusia				
Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan dan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Kesadaran masyarakat 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Pemerintah Ancaman :	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga	1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
peran perempuan dalam pembangunan (S-12)	Sejahtera Indeks Ketimpangan Gender Indeks pembangunan gender (IPG) Indeks pemberdayaan gender (IDG)	untuk ber KB dan membangun keluarga berkualitas Kelemahan : • Angka pengangguran penduduk perempuan relatif tinggi • Alat kontrasepsi KB terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kehamilan diluar nikah relatif tinggi • Angka kematian akibat penyakit relatif tinggi 	2. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender 3. Memberdayakan kaum perempuan	keluarga 2. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender
Meningkatnya kemandirian pemuda (S-13)	% pemuda mandiri	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Bupati Terpilih • Kesadaran masyarakat untuk membantu sesama Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> • Etos kerja pemuda masih rendah 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah secara nasional Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> • Budaya merantau di kalangan pemuda relatif tinggi 	1. Memberikan tunjangan hidup kepada pemuda 2. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda	1. Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda
Meningkatnya prestasi olah raga bagi pemuda dan masyarakat (S-12)	Prestasi olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Bupati Terpilih • Ketersediaan atlit olahraga yang memadai Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya perstasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah secara nasional Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> • Budaya merantau di kalangan pemuda 	1. Meningkatkan pembinaan keolahragaan bagi pemuda dan masyarakat	1. Meningkatkan pembinaan keolahragaan bagi pemuda dan masyarakat
Misi 4:					

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata					
Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Selayar	Jumlah ferry yang melayani Pamatata – Bira PP (unit)	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan penyeberangan yang senantiasa meningkat Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah armada ferry yang terbatas Jumlah dan kapasitas Dermaga penyeberangan belum memadai Kapasitas Bandara Aroeppala yang belum memadai 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kebijakan pemerintah di tingkat atas Posisi strategis daerah yang berada di tengah bentang barat dan timur NKRI Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Letak geografis Kondisi iklim dan gelombang pasang air laut 	1. Meningkatkan aksesibilitas dari dan ke Kabupaten Kepulauan Selayar serta dari dan ke wilayah kepulauan 2. Membangun dukungan pusat terkait penambahan armada ferry	Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi
	Intensitas kedatangan dan keberangkatan ferry (kali)				
	Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal PELNI (kali)				
	Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Cargo (kali)				
	Terbukanya Layanan Penerbangan Selayar – Makassar (PP) (kali/minggu)				
	Terbukanya Layanan Penerbangan Selayar –				

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
	Surabaya (PP) (kali/minggu)				
	Terbukanya Layanan Penerbangan Selayar – Bali (PP) (kali/minggu)				
	Terbukanya Layanan Penerbangan Selayar – Lombok (PP) (kali/minggu)				
	Terbukanya Layanan Penerbangan Selayar – Wakatobi (PP) (kali/minggu)				
	Terbukanya Layanan Penerbangan Selayar – Kupang (PP) (kali/minggu)				
Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	Panjang Jalan Lingkar Timur Utara Terbangun	Kekuatan : • Komitmen Bupati Terpilih • Letak geografis dan posisi strategis daerah	Peluang : • Dukungan Kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan	1. Membangun dukungan pusat terkait peningkatan infrastruktur 2. Meningkatkan	1. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi
	Panjang Jalan Lingkar Timur				

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
	<p>Tengah Terbangun</p> <p>Panjang Jalan Lingkar Timur Selatan Terbangun</p> <p>Panjang jalan dengan kondisi mantap (%)</p> <p>Panjang Landasan Pacu Bandara Aroeppala</p> <p>Panjang Landasan Pacu Bandara Kayuadi</p> <p>Jumlah Pelabuhan Laut</p> <p>Kapasitas dan Daya Tampung Terminal Angkutan Barang dan Penumpang (%)</p> <p>Rasio jaringan irigasi</p> <p>Rasio ketersediaan air</p>	<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan infrastruktur dasar belum memadai 	<p>pembangunan antara KBI dan KTI</p> <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya keinginan dari daerah lain yang memiliki potensi yang sama dengan SELAYAR 	<p>kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur energi</p>	<p>2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur energi</p>

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
	baku Rasio Rumah layak Huni (%) Cakupan Sanitasi Layak (%) Kawasan Pemukiman Kumuh (%) Rasio Ketersediaan Air Bersih (%) - Rumah Tangga (%) - Industri (%) Rasio Elektrifikasi (%) - Rumah Tangga (%) - Industri (%) PLTMG Terbangun dan Beroperasi Terminal Gas Terbangun dan Beroperasi				
Meningkatnya kinerja kepariwisataan	Jumlah kunjungan wisatawan	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Keragaman Potensi 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kebijakan pemerintah yang 	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan dan obyek	Meningkatkan minat dan daya tarik wisata

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
daerah (S-17)		wisata daerah Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan infrastruktur kepariwisataan belum memadai 	bertekad untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Adanya keinginan yang sama dari daerah lain yang memiliki potensi wisata yang sama 	wisata 2. Meningkatkan minat dan daya tarik wisata	
Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan (S-18)	Tingkat kelancaran Barang dan Penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Dermaga pelabuhan laut tersedia di setiap ibukota kecamatan Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya angkutan laut yang melayani wilayah kepulauan Kapasitas kepelabuhanan yang masih terbatas 	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kebijakan pemerintah terutama dalam kaitannya dengan TOL LAUT Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Iklim dan cuaca buruk di laut 	1. Menambah armada angkutan laut ke wilayah pulau 2. Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau	Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau
	Tingkat kelancaran arus barang dan penumpang				
Meningkatnya investasi (S-16)	Nilai PMDN	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Potensi SDA yang melimpah khususnya kelautan, perikanan, dan pariwisata Kelemahan :	Peluang : <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kebijakan pemerintah di tingkat atas Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kegiatan investasi 	1. Meningkatkan minat dan daya tarik investasi 2. Melaksanakan fisibility study kelayakan investasi	1. Meningkatkan minat dan daya tarik investasi
	Nilai PMA				

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya infrastruktur pendukung investasi 	<p>khususnya di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata</p>		
Terbangunnya dan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (S-17)	Penetapan KEK Pariwisata	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Potensi SDA yang melimpah khususnya pariwisata Tersedia lahan pengembangan usaha / Infrastruktur kepariwisataan <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya infrastruktur pendukung investasi 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kebijakan pemerintah di tingkat atas <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kegiatan investasi khususnya di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan lahan Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK Pariwisata
	Perkembangan Realisasi Pembangunan KEK Pariwisata (%)				
	Jumlah Investor yang berinvestasi di dalam KEK Pariwisata (Investor)				
Terbangunnya dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang (S-20)	Penetapan kawasan pelabuhan perikanan nusantara	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Potensi SDA yang melimpah khususnya kelautan dan perikanan <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kebijakan pemerintah di tingkat atas <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kegiatan investasi 	<ol style="list-style-type: none"> Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 	<p>Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan</p>

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
	Perkembangan Realisasi Pembangunan Infrastruktur pada Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	infrastruktur pendukung investasi sektor kelautan dan perikanan	khususnya di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata	masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu. 2. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur pada Kawasan Industri Perikanan Terpadu	berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu
	Jumlah Investor yang berinvestasi di dalam Kawasan Industri Perikanan Terpadu (Investor)				
	Produksi kapal rakyat				
Misi 5 Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah					

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) (S-22)	Penetapan kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Posisi Strategis SELAYAR yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya infrastruktur utama dan pendukung kegiatan distribusi logistik 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kebijakan pemerintah di tingkat atas <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kegiatan investasi khususnya terkait kegiatan distribusi logistik 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistic Menyediakan lahan yang cukup untuk kepentingan pengembangan kawasan 	Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistik
	Perkembangan Realisasi Pembangunan Infrastruktur Utama dan Pendukung pada Kawasan Distribusi Logistik (%)				
	Jumlah Investor yang berinvestasi pada Kawasan Distribusi Logistik (Investor)				
Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional (S-23)	Penetapan kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Posisi Strategis SELAYAR yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kebijakan pemerintah di tingkat atas <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum berkembangnya kegiatan investasi 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional 	Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional
	Perkembangan Realisasi Pembangunan Infrastruktur				

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
	<p>Utama dan Pendukung pada Kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional (%)</p> <p>Jumlah Investor yang berinvestasi pada Kawasan Industri Perkapalan Strategis Nasional (Investor)</p>	infrastruktur utama dan pendukung kegiatan Industri Perkapalan Strategis Nasional	sektor perkapalan strategis	2. Memberikan kemudahan berinvestasi khususnya sector industry perkapalan strategis	
Ditetapkannya dan dikembangkan SELAYAR sebagai salah satu Basis Utama Pertahanan Negara (S-24)	Kabupaten Kepulauan Selayar Menjadi Basis Utama Pertahanan Negara	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Posisi Strategis SELAYAR yang berada di tengah-tengah bentang barat dan timur NKRI Jumlah pulau yang banyak (130 buah pulau) <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya infrastruktur utama dan pendukung sebagai Basis Pertahanan Negara 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kebijakan pemerintah di tingkat atas <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kemampuan negara dalam menyediakan ALUSISTA 	<p>1. Memperkuat posisi dan peran strategis Selayar</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah</p>	Memperkuat posisi dan peran strategis Selayar
Bertambahnya	% Peningkatan	Kekuatan :	Peluang :	1. Membangun system	Melaksanakan revolusi

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan (S-25)	Produksi Pertanian Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Luas lahan masih tersedia cukup Mayoritas penduduk bergerak di sektor pertanian Kelemahan : <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya kemampuan petani Sarana dan prasarana pertanian terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas ketahanan pangan nasional Ancaman : <ul style="list-style-type: none"> Angkatan kerja lokal sektor pertanian dan perkebunan melakukan Migrasi ke luar daerah 	pertanian yang tangguh 2. Membangun sentra pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan 3. Meningkatkan keterampilan petani 4. Melaksanakan revolusi tani	tani
	% Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Palawija				
	% Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Holtikultura				
	% Peningkatan Produksi Perkebunan				
	Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan				
	Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Palawija				
	Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman				

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
	Holtikultura				
	Tingkat Produktivitas Perkebunan				
	Pulau Tanamalala menjadi Pusat Pemurnian Sapi Bali	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Tersedia pulau-pulau tak berpenghuni yang potensial dikembangkan sebagai lahan peternakan <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Budaya beternak belum terbangun di masyarakat Ternak yang ada seringkali dibiarkan berkeliaran oleh pemiliknya 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas ketahanan pangan nasional <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Angkatan kerja lokal sektor peternakan, melakukan Migrasi ke luar daerah Populasi ternak sapi yang meningkat dapat mengancam kegiatan usaha petani 	Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi	Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi
	Pulau Kalao menjadi Tempat Pembiakan Ternak Unggul				
	% Peningkatan Produksi Ternak				
	Luas Hutan Rakyat	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Tersedia lahan pengembangan hutan rakyat <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Budaya beternak belum terbangun di masyarakat Ternak yang ada 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor kayu dan hasil hutan non kayu <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terjadinya kasus illegal logging 	Mengembangkan Kawasan Hutan Rakyat	Mengembangkan Kawasan Hutan Rakyat
	Nilai Hutan Non Kayu				

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
		seringkali dibiarkan berkeliaran oleh pemiliknya			
	% Peningkatan Produksi Perikanan dan kelautan	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none">Komitmen Bupati TerpilihWilayah Perairan Laut SELAYAR ditetapkan sebagai Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 meliputi Selat Sulawesi, Teluk Bone, dan Laut Flores	Peluang : <ul style="list-style-type: none">Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas ketahanan pangan nasional dan peningkatan nilai ekspor termasuk ekspor komoditi ikan dan hasil olahannya.	1. Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan	Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan
	- Tangkap			2. Meningkatkan pengawasan di wilayah perairan laut Selayar	
	- Budidaya	Kelemahan : <ul style="list-style-type: none">Rendahnya kemampuan nelayan dalam menggunakan alat tangkap modernJumlah Armada Tangkap masih terbatasKegiatan budidaya perikanan belum menjadi budaya masyarakat	Ancaman : <ul style="list-style-type: none">Keberadaan nelayan luar yang beroperasi di wilayah perairan Laut Selayar dengan kemampuan yang lebih baik dalam melakukan aktivitas penangkapan ikanMasih adanya praktek illegal fishing berupa pemboman dan pembiusan yang merusak ekosistem dan habitat ikan serta biota laut lainnya.		

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup (S-30)	Indeks Lingkungan Hidup	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none">Komitmen Bupati TerpilihKondisi lingkungan hidup yang masih baikAdanya kelembagaan pemerintah daerah yang mengurus lingkungan hidup Kelemahan : <ul style="list-style-type: none">Adanya ilegal loggingAdanya kegiatan ilegal fishingKesadaran masyarakat relatif masih rendah	Peluang : <ul style="list-style-type: none">Kebijakan pemerintah untuk melestarikan potensi SDA Indonesia Ancaman : <ul style="list-style-type: none">Kegiatan investasi yang tidak ramah lingkunganAktivitas lain yang mengancam keseimbangan ekologi	1. Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2. Mengantisipasi terjadinya illegal logging dan illegal fishing	Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
	Status Mutu Lingkungan Hidup				
	Indeks Aktivitas Pertambangan yang ramah Lingkungan				
Misi 6 Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.					
Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja (S-27)	Daya serap tenaga kerja (%)	Kekuatan : <ul style="list-style-type: none">Komitmen Bupati TerpilihKomposisi Penduduk didominasi penduduk usia produktifTersedia lapangan kerja terutama sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan	Peluang : <ul style="list-style-type: none">Kebijakan pemerintah untuk memperluas lapangan pekerjaan Ancaman : <ul style="list-style-type: none">Ketersediaan tenaga kerja lokal tdak sesuai dengan kebutuhan investasiTenaga kerja luar lebih	1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar 2. Memberikan bantuan modal usaha bagi pencari kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
		<p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja Masih rendahnya keterampilan angkatan kerja Masih adanya gengsi dari angkatan kerja untuk terjun ke sektor pertanian dan perikanan 	kompeten dibanding tenaga kerja lokal		
Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan (S-28)	Skor daya saing ekonomi kerakyatan	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Komposisi Penduduk didominasi penduduk usia produktif Tersedia lapangan kerja terutama sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja Masih rendahnya keterampilan angkatan kerja 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah untuk melestarikan potensi SDA Indonesia <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan investasi yang tidak ramah lingkungan Aktivitas lain yang mengancam keseimbangan ekologi 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keberdayaan koperasi dan UMKM Memberikan bantuan tambahan modal usaha bagi koperasi dan UMKM 	Meningkatkan keberdayaan koperasi dan UMKM

Sasaran	Indikator Sasaran	Kekuatan/Kelemahan	Peluang/Ancaman	Alternatif Strategi	Strategi Terpilih
1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya gengsi dari angkatan kerja untuk terjun ke sektor pertanian dan perikanan 			
Misi 7					
Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan					
Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar (S-29)	Indeks integritas keselayaran	<p>Kekuatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Komitmen Bupati Terpilih Sebagian besar masyarakat masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal <p>Kelemahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Lembaga adat yang telah ada belum mampu memainkan peran secara optimal 	<p>Peluang :</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pemerintah untuk melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia <p>Ancaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengaruh budaya luar yang seringkali menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam segala aktivitas masyarakat Mendorong peran lembaga sosial kemasyarakatan dalam pengembangan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal 	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam segala aktivitas masyarakat

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Mengacu pada teori tersebut diatas serta berdasar pada hasil analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan, isu-isu strategis, serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar lima tahun kedepan.

Berikut ini adalah gambaran arah kebijakan berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya pada table 6.2. di bawah ini:

Tabel 2.b

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi serta basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan	Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi serta nilai utama dalam penyelenggaraan pembangunan (T-1)	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama (S-1)	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam segala aktivitas masyarakat	Internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas kehidupan
				Meningkatkan kerukunan kualitas kehidupan beragama	Penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel(S-2)	Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah
					Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran
					Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah
					Peningkatan kualitas manajemen aset daerah

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor	Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah
					Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah
				Meningkatkan kualitas manajemen Aparatur Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya penerapan <i>punishment dan reward</i>	Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis <i>merit system</i>
		Memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kesadaran hukum (T-3)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S-4)	Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas	Perbaikan dan penerapan Sistem dan Prosedur pelayanan publik
			Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (S-5)	Memelihara kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif	Peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
		Sinkronisasi dan integrasi kebijakan di bidang transmigrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (T-4)	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi local berdasarkan kebutuhan daerah (S-6)	Membuka kawasan baru untuk pengembangan transmigrasi lokal	Pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penempatan transmigran lokal
	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa (T-5)		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (S-7)	Meningkatkan integritas, kualitas, kapasitas, profesionalisme aparat pemerintah desa dalam	Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme,

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik	pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa
3.	Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat (T-6)	Berkurangnya penduduk Miskin (S-8)	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi	Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin
			Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	Meningkatkan daya beli masyarakat	Perbaikan income perkapita
					Pengendalian harga
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S-10)		Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita
				Menuntaskan penduduk buta aksara	Peningkatan pembinaan keaksaraan
				Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	Peningkatan , pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan
				Menyelenggarakan pendidikan yang berakarakter	Internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S-11)	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					dan tidak menular, serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan mesyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan
			Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan dan peran perempuan dalam pembangunan (S-12)	Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga	Peningkatan kualitas keluarga
				Meningkatkan kualitas kesetaraan gender	Pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan
		Meningkatkan peran pemuda dan membudayakan olahraga (T-7)	Meningkatnya kemandirian pemuda (S-13)	Meningkatkan upaya pembinaan dan pemberdayaan pemuda	Peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda
			Meningkatnya prestasi olah raga bagi pemuda dan masyarakat (S-14)	Meningkatkan pembinaan keolahragaan bagi pemuda dan masyarakat	Pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan
4.	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata	Meningkatkan kemampuan membuka isolasi daerah (T-8)	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Selayar (S-15)	Meningkatkan layanan jasa perhubungan dan transportasi	Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi
		Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar (T-9)	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar (S-16)	Meningkatkan kapasitas infrastruktur perhubungan dan transportasi	Penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut dan udara
				Meningkatkan kapasitas infrastruktur air dan irigasi	Pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi
				Meningkatkan kapasitas	Pembangunan dan

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	peningkatan perumahan dan kawasan permukiman
				Meningkatkan kapasitas infrastruktur energi	Penyediaan energi listrik bagi rumah tangga dan industri
		Merevitalisasi kawasan dan obyek wisata (T-10)	Meningkatnya kunjungan wisatawan (S-17)	Meningkatkan minat dan daya tarik wisata	Pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah
					Peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata
					Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat
					Peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan
		Meningkatkan keterintegrasi wilayah daratan dan pulau-pulau (T-11)	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan (S-18)	Meningkatkan kualitas layanan jasa perhubungan dan transportasi antar pulau	Penyediaan infrastruktur kepelabuhanan Penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan
5.	Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	Meningkatkan minat dan daya tarik investasi	Peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor
		Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis Wilayah	Terbangun dan berkembangnya Kawasan	Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	keunggulan komparatif dan kompetitif daerah	dalam rangka optimiliasi pemanfaatan Sumberdaya Kemaritiman (T-13)	Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (S-20)	agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian selatan Pulau Selayar sebagai KEK Pariwisata	terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian selatan Pulau Selayar)
			Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang (S-21)	Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry perikanan terpadu
					Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara
					Pengembangan industri kapal rakyat
			Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) (S-22)	Meningkatkan dukungan kerjasama berbagai pihak agar dapat ditetapkan dan dikembangkan bagian utara Pulau Selayar sebagai kawasan distribusi logistik	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama pendukung kegiatan distribusi logistik pada kawasan yang telah

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan (S-23)		ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar)
				Melaksanakan revolusi tani	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
				Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi	Penetapan Pulau Tanamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali
					Penetapan Pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul
					Lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pola usaha ternak rakyat
				Mengembangkan Kawasan Hutan Rakyat	Pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat
				Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan	Penguatan kelembagaan nelayan
		Memelihara fungsi lingkungan hidup (T-14)	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam (S-24)	Melaksanakan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

NO	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.	Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan	Meningkatkan keberdayaan tenaga kerja (T-15)	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja (S-25)	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar	Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan
					Perluasan lapangan kerja
		Meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi kerakyatan (T-16)	Meningkatnya daya saing dan produktivitas ekonomi kerakyatan(S-26)	Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan ekonomi kerakyatan	Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan
7.	Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan	Memantapkan jati diri keselayaran (T-17)	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar (S-27)	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam segala aktivitas masyarakat	Pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam setiap aktivitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan

D. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016-2021

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun ke depan. Berikut arah kebijakan pembangunan tahun 2016-2021:

1. Internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas kehidupan;
2. Penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama;
3. Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran;
5. Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah;
6. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah;
7. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah;
8. Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah;
9. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis *merit system*;
10. Perbaikan dan penerapan sistem dan prosedur pelayanan publik;
11. Peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman serta ketertiban umum;
12. Pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penempatan transmigran lokal;
13. Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur, dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa;
14. Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin;
15. Perbaikan income perkapita;
16. Pengendalian harga;
17. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita;
18. Peningkatan pembinaan keaksaraan;

19. Peningkatan, pemerataan hingga perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur, serta jenjang pendidikan;
20. Internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik;
21. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan tidak menular, serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan manajemen kesehatan;
22. Peningkatan kualitas keluarga;
23. Pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan;
24. Peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda;
25. Pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan;
26. Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi;
27. Penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut, dan udara;
28. Pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi;
29. Pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman;
30. Penyediaan energi listrik bagi rumah tangga dan industri;
31. Pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah;
32. Peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata;
33. Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat;
34. Peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan;
35. Penyediaan infrastruktur kepelabuhanan;
36. Penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan;
37. Peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor;
38. Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian selatan Pulau Selayar);
39. Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industri perikanan terpadu;

40. Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara;
41. Pengembangan industri kapal rakyat;
42. Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama pendukung kegiatan distribusi logistik pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar);
43. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
44. Penetapan Pulau Tanamalala sebagai Pusat Pemurnian Sapi Bali;
45. Penetapan Pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul;
46. Lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pola usaha ternak rakyat;
47. Pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat;
48. Penguatan kelembagaan nelayan;
49. Pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
50. Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan;
51. Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan;
52. Perluasan lapangan kerja;
53. Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan;
54. Pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam setiap aktivitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan.

E. Program Prioritas

Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2016 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2016 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan RPJPD 2005-2025.

Mengacu pada RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 serta berdasarkan

permasalahan pembangunan dan isu strategis yang ada, maka Program Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi menjadi 9 (sembilan) bidang prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Bidang Ekonomi;
2. Bidang Infrastruktur;
3. Bidang Pendidikan;
4. Bidang Kesehatan;
5. Bidang Pariwisata dan Budaya;
6. Bidang Pelayanan Umum, Ketertiban dan ketentraman ;
7. Bidang Lingkungan Hidup;
8. Bidang Perlindungan Sosial;
9. Bidang Keagamaan.

Dari bidang prioritas diatas didapatkan sasaran pembangunan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan;
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur masyarakat;
3. Meningkatnya pemerataan, kompetensi peserta didik dan tenaga pendidikan, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. Meningkatnya cakupan, mutu dan akses pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Meningkatnya pengembangan pariwisata dan kebudayaan daerah;
6. Meningkatnya kualitas pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman;
7. Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup;
8. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial; dan
9. Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan.

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urutan prioritas urusan wajib / pilihan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Urusan pemerintahan yang dimaksud meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;

4. Perumahan;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;
15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Kepemudaan dan Olahraga;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Statistik;
23. Kearsipan;
24. Perpustakaan;
25. Komunikasi dan Informatika;
26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
27. Kehutanan;
28. Energi dan Sumber Daya Mineral;
29. Kelautan dan Perikanan;
30. Perdagangan; dan
31. Perindustrian.

Mengacu pada RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 serta berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang ada, maka Indikasi Rencana Program Prioritas :

1. 20 Program SUCI Bupati

Dua puluh Program SUCI (Sehat, Unggul, Cerdas, dan Infrastruktur) yang terdiri atas:

1. Penataan struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintah untuk bergerak secara sinergis dan produktif;
2. Menerapkan E-Government dalam peningkatan pelayanan publik;
3. Meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberlakukan sistem prestasi kerja dan karir;
4. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
7. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
8. Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, dan air bersih/minum;
9. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang terintergrasi di daratan dan kepulauan;
10. Mengembangkan destinasi dan atraksi budaya serta meningkatkan promosi wisata;
11. Memberikan akses dan kemudahan investasi wisata;
12. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah dalam membangun sinergitas dalam pengelolaan sumber daya kemaritiman;
13. Membangun sentra pengembangan komoditas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
14. Meningkatkan kesadaran dan upaya pelestarian fungsi lingkungan;
15. Memberikan peluang dan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi bagi masyarakat yang berbasis pada teknologi;
16. Memberikan dukungan permodalan dan manajemen bagi UKM dalam meningkatkan daya saing serta mencetak 1.000 wirausahawan yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan;

17. Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat;
18. Melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu;
19. Membangun kesadaran politik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi;
20. Membangun pusat studi pengkajian agama dan budaya.

2. 14 Program Prioritas Bupati

1. Gratis pakaian sekolah, sepatu, tas, alat tulis dan bantuan biaya bagi tamatan SMA yang memasuki Perguruan Tinggi;
2. Gratis pengurusan KK, KTP, dan Akta Kelahiran;
3. Gratis beras miskin dan bedah rumah 1000 unit/tahun;
4. Gratis operasi, persalinan, dan pengangkutan pasien ke rumah sakit rujukan;
5. Gratis jaminan kecelakaan 10 Juta/KK;
6. Gratis uang muka pemasangan listrik PLN dan air bersih PDAM;
7. Gratis alat perikanan, pertanian, dan bibit ternak sapi 4 ekor/KK dan kambing 10 ekor/KK;
8. Bantuan modal usaha bagi UMKM Rp. 7,5 Juta/KK;
9. Bantuan pertukangan, perbengkelan dan jahit menjahit berdasarkan profesi;
10. Bantuan makan minum bagi penumpang kapal fery yang pelayarannya tertunda di pelabuhan Bira Bulukumba;
11. Tunjangan hidup bagi anggota masyarakat yang cacat fisik, mental, orang tua jompo, dan yatim piatu;
12. Tunjangan kematian dan takziah;
13. Tunjangan haji/umroh bagi guru dan PNS lainnya yang berprestasi;
14. Menyangga harga komoditas andalan (kopra, pala, cengkeh, jambu mete dan lain-lain).

3. Program SKPD

Program SKPD ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggung jawab langsung dinas teknis. Berikut uraian program sesuai urusan :

a. URUSAN WAJIB

1) Pendidikan

- Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
- Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peningkatan Mutu Pendidikan
- Program Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal
- Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga Pelajar
- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2) Kesehatan

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pengadaan Obat dan BHP
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Pembangunan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Puskesmas dan Jaringannya
- Program Pelayanan Kesehatan Ibu
- Program Pelayanan Kesehatan Balita
- Program Pelayanan Kesehatan Lansia
- Perbekalan Kesehatan
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

3) Pekerjaan Umum

- Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan Lainnya
- Program Pengendalian Banjir
- Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Program Peningkatan Jalan Kabupaten
- Program Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
- Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Air Limbah
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan (Cakupan Pemeliharaan Alat Berat)
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kebinamargaan (Jumlah Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang Tersedia)

4) Perumahan

- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

5) Inspektorat

- Program Peningkatan Peran dan Layanan Inspektorat
- Program Peningkatan Tata Kelola SDM
- Program Perbaikan Praktik Profesional
- Program Peningkatan kualitas perencanaan pengawasan
- Program Pendampingan, Review dan Konsultasi Penyusunan LK SKPD
- Program Pengembangan Indikator dan Capaian Kinerja Individu, Kegiatan dan Program SKPD
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- Program Pencegahan Korupsi
 - Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan
 - Program Implementasi SPIP di Lingkungan SKPD
 - Program Intensifikasi Penanganan Permintaan Pemeriksaan dan Pengaduan Masyarakat
- 6) Penataan Ruang
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Program Perencanaan Tata Ruang
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Penataan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Program Pengelolaan Areal Pemakaman
- 7) Perencanaan Pembangunan
- Kerjasama Pembangunan
 - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
 - Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
 - Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - Program Penguatan Kapasitas Pratama Litbang
 - Program Informasi Ristek Daerah
 - Program Penelitian dan Pengembangan
- 8) Perhubungan
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan media Massa
 - Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
 - Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
 - Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

9) Lingkungan Hidup

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Program Peningkatan Pengujian Kualitas Lingkungan
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Program Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat
- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Kehati)
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup

10) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Program Penataan Administrasi Kependudukan
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- Program Peningkatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga
- Program Sistem Data Gender dan Anak
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Khusus Anak
- Program Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera
- Program Pelayanan Kontrasepsi
- Program Pengendalian Penduduk

11) Sosial

- Pemberdayaan Fakir Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Pembinaan Anak Terlantar
- Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Pelestarian NK.3
- Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

12) Ketenagakerjaan

- Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Perlindungan Tenaga Kerja
- Pengembangan SDM Aparat dan Pengusaha
- Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Pelayanan Administrasi Perkantoran BLK
- Penyediaan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana
- Peningkatan Kualitas Produktivitas Tenaga Kerja dan Memperluas/Membuka Peluang Usaha Baru

13) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Program Penataan Sistem Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Koperasi
- Program Peningkatan Apresiasi Hasil Kinerja Koperasi Atas Prestasi Nilai Dasar dan Pemantapan Jati Diri Koperasi
- Program Penciptaan UMKM yang Produktif
- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
- Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

14) Penanaman Modal

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

- Program Peningkatan dan Pengembangan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15) Kebudayaan

- Program Pengembangan Nilai Budaya
- Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

16) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- Badan Kesbang, Politik, dan Linmas
 - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - Program Pengembangan wawasan Kebangsaan
 - Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan
 - Program Pendidikan Politik Masyarakat
 - Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi
 - Program Pengembangan Nilai Budaya dan Sejarah
- Satuan Polisi Pamong Praja
 - Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
 - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum
 - Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Program Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Perda)
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Program Pengawasan dan Pengendalian Program
 - Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam

- Program Rehabilitasi Pasca Bencana
- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
- Program Penanganan Terpadu Korban Kapal Tenggelam
- Program Penanganan Darurat Bencana
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- Program Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Damkar
- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Personil Damkar

17) Otonomi Daerah, Pemerataan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- Sekretariat Daerah
 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai Nilai Agama
 - Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
 - Program Peningkatan Pemahaman Tentang Narkoba dan HIV/AIDS
 - Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
 - Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama
 - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
 - Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
 - Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
 - Program Penataan Daerah Otonomi Baru

- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yang Ditata
- Program Peningkatan Aktivitas Penyediaan Produk Hukum
- Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan masyarakat
- Program Peningkatan Aktivitas Pengawasan
- Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Bidang Ekonomi
- Program Peningkatan Pelayanan Aparatur
- Program Ketatalaksanaan Daerah
- Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar
- Program Penataan Kelembagaan Daerah
- Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Bidang Pembangunan
- Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
- Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga dan Seni
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengembangan Nilai budaya/Nilai Sejarah
- Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
- Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa
- Sekretariat DPRD
 - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- KECAMATAN
 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
 - Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
 - Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dalam Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Pemerintahan
 - Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Program Peningkatan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial
 - Program Pembinaan Keagamaan
 - Program Otonomi Daerah
 - Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan
 - Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
-
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
 - Program Peningkatan Peran serta Aparatur
 - Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota KORPRI dan Keluarganya
 - Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dan Seni
 - Program Pembinaan Keagamaan
- Badan Kepegawaian Daerah
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
 - Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
 - Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna
 - Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
 - Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan
- Kearsipan
 - Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
 - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

b. URUSAN PILIHAN

1) Pertanian

- Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
- Peningkatan Ketahanan Pangan
- Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
- Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Peningkatan Produksi Peternakan
- Pengembangan Sentra usaha Peternakan
- Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Peternakan
- Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2) Kehutanan

- Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
- Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

3) Energi dan Sumber Daya Mineral

- Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
- Program Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Air Tanah
- Program Pembangunan dan Pengembangan Pusat Informasi Mineral dan Energi
- Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas
- Program Penguatan Perangkat Hukum dan Peningkatan SDM di Bidang Listrik dan Migas
- Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Informasi, Air Tanah, dan Sumber Daya Mineral

4) Pariwisata

- Program Penguatan Kelembagaan Pariwisata

- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Kemitraan pariwisata

5) Kelautan dan Perikanan

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Laut
- Program Sarana dan Prasarana Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
- Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
- Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

6) Perdagangan

- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Pengembangan Perdagangan Koordinasi dan Kerjasama

7) Perindustrian

- Program Peningkatan Kapasitas IPTEK
- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
- Program Penataan Struktur Industri

8) Ketransmigrasian

- Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- Program Transmigrasi Lokal